

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN: KAJIAN LITERATUR TERHADAP HUBUNGAN SEKOLAH, ORANG TUA, DAN KOMUNITAS

Welidul Mustofa ^{1*}, Salito ²

^{1,2} MPI; Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum (STITDAR), Indonesia

*Corresponding Author; welidulmusthofa@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Stakeholder, sekolah, orang tua, komunitas, Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Received : 16 Juni

Revised : 20 Juni

Accepted : 5 Juli

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran stakeholder, khususnya hubungan antara sekolah, orang tua, dan komunitas, dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Melalui kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, ditemukan bahwa keterlibatan stakeholder eksternal seperti orang tua dan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Bentuk keterlibatan meliputi pendampingan belajar, dukungan moral, kontribusi sumber daya, hingga pengembangan lingkungan sekolah. Kolaborasi yang efektif mendukung terciptanya sistem pendidikan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam (MPI), prinsip ukhuwah dan syura menjadi landasan dalam membangun kemitraan yang harmonis dan bertanggung jawab. Kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara sekolah dan stakeholder untuk mewujudkan pendidikan yang holistik dan adaptif terhadap perubahan.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan tidak hanya bergantung pada peran sekolah sebagai lembaga formal, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Mulyasa (2004) menjelaskan bahwa stakeholder dalam bidang pendidikan mencakup semua individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan serta berperan langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan. Mereka memberikan kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan melalui kebijakan,

penyediaan sumber daya, serta pengawasan. Pendapat serupa disampaikan oleh Fattah (2004) yang menyatakan bahwa stakeholder merupakan elemen masyarakat yang ikut serta aktif dalam kemajuan lembaga pendidikan, tidak hanya melalui saran dan pengawasan, tetapi juga partisipasi dalam pembentukan kebijakan dan evaluasi program.

Dalam konteks pendidikan, hubungan yang sinergis antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat menentukan keberhasilan proses belajar. Epstein (2001) mengemukakan bahwa keterpaduan antara ketiga pihak tersebut dapat membangun dukungan yang kuat untuk perkembangan akademik dan sosial peserta didik. Mulyasa (2005) menambahkan bahwa peran aktif orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, Danim (2010) menyoroti bahwa kerja sama yang baik mampu membuka akses sumber daya yang lebih luas serta memperkokoh rasa tanggung jawab sosial bersama.

Meski demikian, hubungan antara sekolah dan stakeholder seringkali menghadapi kendala, seperti komunikasi yang kurang efektif dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif guna memperkuat kemitraan ini, sebagaimana disarankan oleh Sallis (2007), dengan membangun komunikasi dua arah dan proses musyawarah yang transparan.

Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam (MPI), prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan syura (musyawarah) menjadi fondasi dalam membangun hubungan antara sekolah dan stakeholder. Al-Attas (1991) menegaskan bahwa nilai-nilai sosial dan spiritual ini mampu menciptakan suasana pendidikan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. MPI mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan akademik sehingga pendidikan tidak hanya mengutamakan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai moral (Hashim, 2007).

Kajian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas bentuk-bentuk keterlibatan stakeholder secara umum, tetapi juga menelaahnya dalam bingkai nilai-nilai Manajemen Pendidikan Islam (MPI), yang belum banyak dikaji secara integratif. Dengan menggabungkan pendekatan teoritis Barat (Epstein, Sallis) dan nilai-nilai keislaman (ukhuwah dan syura), artikel ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana membangun relasi pendidikan yang harmonis dan holistik antara sekolah, orang tua, dan komunitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Stakeholder dalam Pendidikan

Menurut Mulyasa (2004) Stakeholder adalah pemangku kepentingan di bidang pendidikan melibatkan semua individu atau kelompok yang berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak, dalam proses pendidikan. Mereka memiliki kepentingan terhadap suksesnya pendidikan dan berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan, baik lewat kebijakan, sumber dana, maupun pengawasan. Selain itu Fattah (2004

memberikan pendapat tentang pengertian stakeholder dalam pendidikan, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat yang memainkan peran kunci dalam kemajuan lembaga pendidikan. Mereka tidak hanya memberikan saran dan pengawasan, tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan penilaian program pendidikan. Berdasarkan pendapat Tilaar (2009), pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan adalah semua orang yang memiliki kepentingan di bidang pendidikan dan memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya, sebab pendidikan adalah kewajiban bersama antara negara, komunitas, dan individu.

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa stakeholder dalam pendidikan mencakup seluruh elemen yang terlibat, baik secara internal (seperti guru, siswa, kepala sekolah) maupun eksternal (seperti orang tua, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan LSM). Mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, mutu, serta pencapaian tujuan pendidikan. Kolaborasi yang harmonis antara para stakeholder sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, relevan, dan berkelanjutan.

Hubungan Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas

Hubungan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah faktor krusial untuk mendukung kesuksesan pendidikan. Ketiga unsur ini terhubung satu sama lain dan memiliki tanggung jawab bersama dalam mendukung, mengajarkan, dan menciptakan suasana belajar yang baik bagi siswa. Menurut Epstein (2001), terciptanya relasi yang sinergis antara pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat akan membangun sistem pendukung yang kuat untuk pertumbuhan siswa, baik dari sisi akademik maupun sosial. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya oleh sekolah saja, karena keberhasilannya menuntut keterlibatan aktif dari orang tua dan komunitas sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif.

Sementara itu, Mulyasa (2005) menekankan bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menjalin kolaborasi yang produktif dengan orang tua serta masyarakat. Keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan sekolah dan pemanfaatan sumber daya dari komunitas dinilai dapat memperkuat mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, menurut Danim (2010), membangun hubungan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat mampu membuka peluang lebih luas terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya yang mendukung pendidikan. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat dan orang tua juga dapat memperkuat budaya kerja sama serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar dari pihak sekolah terhadap lingkungan sekitarnya.

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sekolah, orang tua, dan komunitas harus dibangun dalam semangat kemitraan. Kolaborasi ini bukan hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi bagian yang integral dalam proses pendidikan. Melalui sinergi ini, sekolah dapat lebih efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, sementara orang tua dan komunitas merasa memiliki peran nyata dalam pendidikan anak-anak mereka.

Analisis Perbandingan Literatur

Dalam mengkaji peran stakeholder dalam pendidikan, berbagai literatur menyampaikan pandangan yang saling melengkapi namun juga menunjukkan perbedaan pendekatan. Epstein (2001) mengembangkan model enam tipe keterlibatan keluarga dan komunitas yang berfokus pada partisipasi praktis, seperti membantu anak belajar di rumah, berkomunikasi dengan sekolah, dan menjadi sukarelawan. Pendekatan ini menekankan fungsi institusional dan formal dari hubungan antara sekolah, orang tua, dan komunitas.

Namun, pandangan ini dinilai kurang memperhatikan dimensi nilai dan budaya lokal yang sangat berpengaruh dalam konteks pendidikan di negara berkembang, khususnya dalam pendidikan Islam. Di sinilah pendekatan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) memberikan keunikan tersendiri. MPI tidak hanya memfokuskan pada keterlibatan administratif atau instrumental, tetapi juga menekankan nilai ukhuwah (persaudaraan) dan syura (musyawarah), yang mencerminkan relasi yang emosional dan spiritual antar pemangku kepentingan (Al-Attas, 1991).

Sementara Mulyasa (2005) dan Danim (2010) sepakat bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat meningkatkan mutu layanan pendidikan, mereka lebih banyak menekankan sisi manajerial dan teknokratis kerja sama. Sebaliknya, Hashim (2007) menunjukkan bahwa pendidikan yang terpisah dari nilai spiritual akan menciptakan dualisme dan menjauh dari tujuan pendidikan yang holistik. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan teknis dan spiritual, seperti yang ditawarkan MPI, menjadi pendekatan yang lebih utuh. Dengan demikian, kajian ini memosisikan diri sebagai sintesis antara pendekatan Barat yang berorientasi institusional dan pendekatan Islam yang berlandaskan nilai. Keduanya perlu dikawinkan agar dapat menciptakan sistem pendidikan yang bukan hanya efektif secara struktural, tetapi juga kuat secara etis dan spiritual. Ini merupakan kontribusi orisinal dari kajian ini terhadap wacana keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, baik primer maupun sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Kriteria pemilihan literatur meliputi: (1) keterkaitan langsung dengan topik stakeholder pendidikan, (2) sumber akademik yang diakui, dan (3) terbit minimal dalam

rentang 15 tahun terakhir (2001–2023). Peneliti menyeleksi sekitar 15 referensi utama dan menganalisisnya secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara sekolah, orang tua, dan komunitas, serta mengkaji kontribusi nilai-nilai MPI dalam proses tersebut.

HASIL PENELITIAN

Bentuk-Bentuk Keterlibatan Stakeholder

Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan merupakan aspek krusial yang mencerminkan kontribusi nyata dari stakeholder eksternal. Bentuk-bentuk keterlibatan ini mencakup berbagai dimensi, baik dalam lingkup akademik maupun pembentukan karakter anak.

1. Pendampingan Belajar di Rumah

Salah satu bentuk peran aktif orang tua adalah mendampingi anak dalam aktivitas belajar di rumah, seperti membantu menyelesaikan tugas, menciptakan jadwal belajar, dan menanamkan kebiasaan belajar yang teratur. Epstein (2001) mengemukakan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses akademik di rumah mampu memberikan penguatan emosional dan meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Peran Pengasuhan yang Mendukung Proses Pendidikan

Lingkungan keluarga yang penuh perhatian dan mendukung akan mendorong perkembangan kepribadian dan motivasi belajar anak. Mulyasa (2005) menegaskan bahwa pola pengasuhan yang positif memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan sikap anak terhadap pendidikan, termasuk tanggung jawab, disiplin, dan etika sosial.

3. Keikutsertaan dalam Pertemuan Sekolah

Kehadiran orang tua dalam forum resmi sekolah, seperti rapat kelas, konsultasi perkembangan siswa, dan kegiatan komite sekolah, merupakan bentuk kolaborasi langsung dengan pihak sekolah. Menurut Danim (2010), keterlibatan ini membuka ruang dialog antara pendidik dan orang tua, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses pendidikan anak.

Dalam sistem pendidikan, komunitas memegang peranan strategis sebagai stakeholder eksternal yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap proses belajar-mengajar. Istilah “komunitas” dalam konteks ini mencakup berbagai kelompok sosial di luar sekolah, seperti komite sekolah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, tokoh agama, dan warga di lingkungan sekitar sekolah. Keterlibatan komunitas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama: dukungan moral, dukungan logistik, dan pengembangan lingkungan sekolah.

1) Dukungan Moral terhadap Pendidikan

Komunitas lokal, seperti tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga sosial, sering berperan dalam membangun kesadaran kolektif

akan pentingnya pendidikan. Bentuk dukungan ini tercermin dalam partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah, pemberian motivasi kepada siswa, serta advokasi terhadap program-program pendidikan. Menurut Mulyasa, keterlibatan komunitas dalam aspek moral sangat penting untuk menciptakan iklim sosial yang mendukung keberhasilan pendidikan (Mulyasa, 2005).

2) Kontribusi Logistik dan Sumber Daya

Selain dukungan moral, komunitas juga dapat memberikan bantuan material atau logistik, seperti perbaikan fasilitas, bantuan dana, atau partisipasi dalam pelatihan. Perusahaan lokal atau dunia usaha juga dapat mendukung sekolah melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang diarahkan pada pendidikan. Danim menyatakan bahwa kolaborasi antara sekolah dan masyarakat mampu memperkuat sumber daya institusi pendidikan dan memperluas jejaring sosial yang mendukungnya (Danim, 2010).

3) Pengembangan Lingkungan Sekolah yang Mendukung

Lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman merupakan bagian penting dari proses belajar. Warga sekitar sekolah dan komunitas lingkungan hidup dapat berperan dalam menciptakan suasana tersebut. Epstein menekankan bahwa lingkungan sosial yang kondusif mendorong keterlibatan aktif siswa dan memperkuat hubungan sosial yang sehat antara sekolah dan masyarakat (Epstein, 2001).

Stakeholder	Bentuk Keterlibatan	Dampak terhadap Pendidikan
Orang Tua	Pendampingan belajar, hadir di rapat sekolah	Meningkatkan prestasi, kedisiplinan, dan motivasi siswa
Komunitas	Dukungan moral, logistik, lingkungan	Tercipta lingkungan belajar yang aman dan mendukung
Dunia Usaha	CSR untuk pendidikan, pelatihan keterampilan	Meningkatkan akses sumber daya dan relevansi kurikulum

Stakeholder	Bentuk Keterlibatan	Dampak terhadap Pendidikan
Pemerintah	Kebijakan, pengawasan, dana pendidikan	Menjamin mutu dan keberlanjutan program pendidikan

Pentingnya peran orang tua dan komunitas sebagai bagian utama dari stakeholder eksternal dalam pendidikan. Keterlibatan orang tua tidak hanya membantu anak secara akademik, tapi juga membentuk karakter dan motivasi belajar yang kuat. Sementara itu, komunitas memberikan dukungan moral, sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Sinergi antara sekolah, orang tua, dan komunitas ini sangat penting untuk menciptakan proses pendidikan yang efektif dan menyeluruh.

Kontribusi Stakeholder Terhadap Pengelolaan Pendidikan

Penguatan mutu layanan pendidikan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Pihak-pihak ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan utama, yaitu unsur internal (seperti pendidik, kepala sekolah, peserta didik, dan staf administratif), unsur pemerintah (terdiri dari pengawas, dinas pendidikan, hingga kementerian), serta unsur masyarakat (meliputi orang tua, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan penyedia jasa pendidikan). Ketiga kelompok ini memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah dan kebijakan lembaga pendidikan melalui partisipasi aktif dan kolaboratif (Hariyadi, 2022).

Kontribusi dari stakeholder eksternal, terutama masyarakat dan dunia kerja, terlihat dalam bentuk penyediaan dukungan sumber daya, baik materiil maupun non-materiil, serta keterlibatan dalam pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Sementara itu, stakeholder internal seperti guru dan pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada mutu (Kemendikbud, 2019). Kemitraan antara stakeholder internal dan eksternal menjadi elemen penting dalam sistem penjaminan mutu. Melalui kerja sama yang erat dan komunikasi yang terbuka, institusi pendidikan dapat membangun legitimasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta menciptakan layanan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (UIN Jambi, 2023).

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah merupakan langkah penting dalam mewujudkan tanggung jawab publik. Ketika warga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, maka transparansi akan lebih mudah diwujudkan. Keterbukaan ini membuat sekolah lebih dipercaya karena masyarakat merasa memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program. Bentuk partisipasi dapat diwujudkan melalui musyawarah, forum komunikasi, atau keanggotaan dalam lembaga sekolah. Dengan demikian, pelibatan masyarakat bukan hanya mendukung jalannya program, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan secara menyeluruh (Hariyadi, 2022).

Dari teori diatas menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak, baik dari dalam sekolah, pemerintah, maupun masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara mereka membantu membuat program pendidikan lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sekolah jadi lebih dipercaya dan bertanggung jawab.

Tantangan dan Solusi dalam Hubungan Sekolah-Stakeholder

Sallis (2007) mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam menciptakan hubungan yang kuat antara sekolah dan para pemangku kepentingan adalah terbatasnya komunikasi yang bersifat timbal balik, lemahnya pelibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, serta kurangnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dari institusi pendidikan. Banyak sekolah masih menjalankan peran secara eksklusif, tanpa membuka ruang partisipasi yang cukup bagi masyarakat atau orang tua, yang akhirnya menimbulkan jarak dan keterasingan antara sekolah dan lingkungannya.

Sebagai solusi, Sallis mengusulkan penerapan prinsip *Total Quality Management (TQM)* dalam sistem pendidikan. Pendekatan ini menempatkan stakeholder sebagai mitra utama dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:

1. Membentuk pola komunikasi yang transparan dan saling mendengarkan,
2. Menyelenggarakan forum dialog atau musyawarah bersama stakeholder secara rutin,
3. Memberikan ruang dalam proses kebijakan atau perencanaan sekolah,
4. Mengimplementasikan sistem pelaporan kinerja sekolah yang terbuka untuk publik.
5. Melalui prinsip TQM, keterlibatan semua unsur masyarakat menjadi bagian integral dari upaya perbaikan dan pengembangan pendidikan secara terus-menerus.

Dalam pendekatan Manajemen Pendidikan Islam, Al-Attas (1991) menekankan bahwa permasalahan dalam hubungan sekolah dan masyarakat tidak hanya terletak pada aspek struktural atau manajerial, tetapi lebih dalam

lagi berkaitan dengan hilangnya nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendasari interaksi antarpihak. Jika prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan syura (musyawarah) tidak dihidupkan dalam hubungan ini, maka kerja sama menjadi kaku, formalistik, dan kehilangan ruh kebersamaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, MPI menawarkan solusi berbasis nilai yang mencakup:

1. Menjadikan musyawarah sebagai prinsip utama dalam merancang kebijakan dan kegiatan pendidikan yang menyentuh kepentingan publik,
2. Menumbuhkan ikatan emosional dan kepemilikan bersama terhadap sekolah melalui semangat ukhuwah,
3. Memperkuat tanggung jawab kolektif dalam mendidik generasi, dengan menjadikan pendidikan sebagai amanah bersama umat.

Konsep pendidikan dalam Islam menitikberatkan pada proses pembentukan karakter dan akhlak mulia, yang berpadu dengan penguasaan ilmu, serta terjalin dalam relasi sosial yang harmonis dan saling menguatkan.

Baik pendekatan TQM dalam tradisi Barat maupun MPI dalam kerangka Islam sepakat bahwa keterlibatan stakeholder merupakan unsur krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang bermutu. Namun, keduanya menempuh jalur yang berbeda: pendekatan Barat lebih mengedepankan sisi teknis, sistemik, dan berbasis efektivitas kelembagaan, sementara MPI membangun partisipasi melalui nilai spiritual, kebersamaan, dan keadaban sosial. Perpaduan keduanya dapat menghasilkan model kolaborasi yang menyeluruh, tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga bermakna secara nilai dan budaya.

Model Model Relasi Sekolah-Stakeholder dalam Perspektif MPI

Dalam Manajemen Pendidikan Islam (MPI), interaksi antara sekolah dan para stakeholder didasarkan pada prinsip ukhuwah atau persaudaraan serta syura yang berarti musyawarah. Prinsip ukhuwah menciptakan hubungan yang erat dan rasa kekeluargaan sehingga mendorong kerja sama yang erat di antara semua pihak yang terlibat. Sedangkan syura menjadi mekanisme untuk membuat keputusan bersama yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, sehingga menghasilkan transparansi dan tanggung jawab bersama terhadap jalannya pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengelolaan administratif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam Islam, yang bertujuan menciptakan suasana pendidikan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Al-Attas, 1991).

Kerja sama yang berkelanjutan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang stabil dan

berkualitas. Dalam kerangka Manajemen Pendidikan Islam (MPI), hubungan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merupakan hubungan sosial yang didasarkan pada nilai ukhuwah, yang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Orang tua dan komunitas diharapkan berperan aktif sebagai mitra strategis dalam seluruh proses pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan melibatkan prinsip musyawarah. Melalui kemitraan yang konsisten dan berlandaskan nilai-nilai Islam tersebut, sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung, responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Epstein, 2001).

Dalam kerangka Manajemen Pendidikan Islam (MPI), sangat penting untuk menyatukan aspek spiritual, sosial, dan akademik dalam membangun hubungan antara sekolah dan para stakeholder. Pendidikan Islam tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan intelektual, tetapi juga menekankan pembentukan karakter serta pengembangan nilai-nilai moral yang berakar dari spiritualitas. Aspek sosial berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi secara konstruktif dalam komunitas, sementara aspek akademik fokus pada peningkatan kapasitas intelektual dan kompetensi siswa. Dengan melibatkan secara aktif guru, orang tua, dan masyarakat berdasarkan prinsip kebersamaan dan musyawarah, sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyeluruh dan harmonis yang mendukung keberhasilan proses pendidikan secara komprehensif (Hashim, 2007).

Hubungan yang kuat antara sekolah dan stakeholder dengan dasar persaudaraan dan musyawarah. Kerja sama yang baik antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat dibutuhkan agar pendidikan berjalan lancar dan berkualitas. Selain itu, pendidikan harus menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan akademik agar siswa tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter dan bisa bergaul dengan baik. Dengan melibatkan semua pihak secara aktif, sekolah bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberhasilan siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa peran stakeholder khususnya hubungan antara sekolah, orang tua, dan komunitas merupakan elemen kunci dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar, pengasuhan yang mendukung, serta partisipasi dalam kegiatan sekolah, bersama kontribusi komunitas dalam bentuk dukungan moral, sumber daya, dan pengembangan lingkungan, secara nyata berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Tantangan dalam hubungan ini dapat diatasi melalui komunikasi terbuka, musyawarah, dan keterlibatan aktif semua pihak sebagai mitra sejajar. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam (MPI), nilai ukhuwah dan syura menjadi dasar dalam membangun kemitraan yang harmonis, yang menyatukan aspek spiritual, sosial, dan

akademik. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah dan stakeholder sangat penting untuk mewujudkan pendidikan holistik yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan zaman.

REKOMENDASI

Untuk mewujudkan pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif dan berkelanjutan, sekolah perlu secara aktif membangun kemitraan strategis dengan orang tua dan komunitas melalui program komunikasi yang terbuka, forum musyawarah rutin, dan pelibatan dalam kegiatan sekolah. Orang tua perlu diberdayakan sebagai mitra dalam proses belajar anak melalui pelatihan parenting Islami, sementara komunitas dapat didorong untuk berkontribusi dalam bentuk sumber daya, jejaring sosial, dan lingkungan belajar yang mendukung. Nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan) dan syura (musyawarah) dalam Manajemen Pendidikan Islam harus menjadi fondasi dalam membangun sinergi ini, guna menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik, partisipatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Islam juga disarankan memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas untuk memperkuat kolaborasi ini di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. ISTAC.
- Danim, S. (2010). *Peran serta masyarakat dalam pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Epstein, J. L. (2001). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Westview Press.
- Fattah, N. (2004). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hariyadi. (2022). Partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 215–228.
- Hashim, R. (2007). Philosophy of Islamic education. *Islamic Quarterly*, 51(4), 299–310.
- Kemendikbud. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sallis, E. (2007). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.

- Tilaar, H. A. R. (2009). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian kebijakan, strategi, dan inovasi pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UIN Jambi. (2023). *Peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi masyarakat dan dunia usaha*. Jambi: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.